



yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi latar belakang dan kebudayaan politik yang dimiliki, seperti sistem politik demokrasi Pancasila di Indonesia.

Sistem politik ini, merupakan hasil perenungan bangsa Indonesia terhadap berlakunya dua corak tingkah laku sistem politik yang ekstrem dimasa pemerintahan orde lama, yakni: (1) Berlakunya sistem politik Liberal yang melahirkan kebebasan politik tanpa batas, sehingga mengakibatkan konflik yang berlarut-larut. Kondisi ini disebabkan adanya pembagian kekuasaan politik secara adil berdasarkan kekuatan-kekuatan politik yang ada dan hidup dalam masyarakat, yang mempunyai potensi menciptakan orientasi kepada kekuasaan yang berlebihan. Sehingga pertentangan ideologi dan perselisihan paham sangat dominan, yang akhirnya menggiring masyarakat kedalam kotak-kotak ideologi dan golongan yang sangat keras dan ketat, dan (2) Berlakunya sistem politik demokrasi Terpimpin, yang melakukan penindasan dan penekanan kebebasan politik yang praktis mematikan konflik atau kritik. Pada masa ini kekuasaan pemerintah sangat otoriter.

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi Pancasila, merupakan alternatif baru dari sistem politik ideal yang hendak dibangun, yaitu mencari sebuah format sistem politik yang menempatkan keseimbangan yang wajar antara konflik dan konsensus,

atau memandang konflik sebagai sesuatu yang wajar dalam berpolitik sambil diimbangi sebuah konsensus politik yang berpolarisasi kepada satu kesepakatan, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas segala-galanya.

Guna merealisasikan sistem politik ideal diatas maka sejak pemerintahan Orde Baru telah diletakkan sebuah pondasi format politik yang diharapkan mampu menghasilkan ketenangan dan kesetabilan politik dalam masyarakat, dengan berusaha menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan politik selama pemerintahan Orde Lama.

Tingkah laku politik Orde Baru sejak tahun 1968, tampak dengan jelas menjurus kepada usaha-usaha untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dimasa Orde Lama. Sehingga sejak itu kita melihat terjadinya proses pertumbuhan sebuah kekuasaan eksekutif yang kuat dibawah pimpinan Jenderal Soeharto, bersamaan dengan itu terjadi proses pengukuhan posisi militer beserta Golongan Karya sebagai landasan kekuatan utamanya. Seiring dengan itu kita melihat sebuah proses penyederhanaan sistem kepartaian berlangsung pula dengan lancar dan sistematis. Semua itu telah berhasil menciptakan semacam kestabilan politik. Dengan demikian sebuah format politik baru sudah terbentuk (Alfian, 1981: 48).

Berpijak dari analisa diatas, dapat disimpulkan

bahwa eksistensi single majority Golongan Karya (GOLKAR) merupakan kemauan politik dari pemerintah Orde Baru untuk menciptakan proses pembentukan sebuah kekuasaan eksekutif yang kuat dan efektif, sehingga dapat tercipta stabilitas politik yang mantap dan terkendali.

Yang menjadi pokok permasalahan sekarang adalah, sejauh mana perilaku dan batasan-batasan yang harus diciptakan dalam tubuh GOLKAR sebagai salah satu landasan kekuatan utama dalam menciptakan sebuah kekuasaan eksekutif yang kuat dalam rangka mencapai stabilitas politik. Apakah eksistensi single majoritynya GOLKAR saat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi menurut Islam?.

Dalam Islam, paham persamaan pasti mempunyai dampak politis. Sehingga masyarakat Islam haruslah sebuah masyarakat yang demokratis, sehingga sistem-sistem politik yang otoriter apalagi yang totaliter harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam apapun alasannya. Karena hanya dalam sistem politik demokratislah, anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh (Maarif, 1995: 69).

Selain itu, sistem demokrasi yang diinginkan Islam adalah menciptakan nilai-nilai intelektual dan spiritual yang saling menopang dan saling melengkapi. Sebab











san teori menuju ke pembahasan hasil riset. Bab dua ini berisi tentang: Landasan teori demokrasi Islam. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang dasar-dasar pemerintahan Islam, dan sub bab kedua tentang prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi dalam Islam, meliputi; prinsip syura, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan prinsip persamaan.

Bab III : Bab tiga ini merupakan bahasan dari hasil penelitian. Bab tiga ini berisi tentang : Single majority Golkar dalam sistem politik Indonesia. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang eksistensi Golkar di Indonesia, dan sub bab kedua tentang dominasi Golkar dalam pengambilan keputusan, meliputi; pemerintahan, dan legislatif.

Bab IV : Bab empat ini merupakan analisa bab tiga dengan memakai pisau bab dua. Bab empat ini berisi tentang: Single majority Golkar dalam sistem politik di Indonesia dalam perspektif siyasah Islam. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang eksistensi Golkar dalam perspektif demokrasi

Islam, dan sub bab kedua tentang dominasi Golkar dalam perspektif prinsip demokrasi Islam, meliputi; Dominasi Golkar dalam - perspektif prinsip syura, dominasi Golkar dalam perspektif prinsip keadilan, dominasi Golkar dalam perspektif prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan dominasi Golkar dalam perspektif prinsip persamaan.

Bab V : Bab lima ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang meliputi simpulan dan saran-saran.